

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024 mencapai 281,6 juta jiwa. Permasalahan utama yang menyertai pertumbuhan penduduk di Indonesia meliputi penyebaran penduduk yang tidak merata, rendahnya kualitas hidup, serta peningkatan populasi yang terus berlanjut (Lestari *et al.*, 2024). Laju pertumbuhan penduduk yang pesat serta penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan pemerintah mengalami kesulitan dalam meningkatkan kualitas dan mutu penduduk. Rendahnya pembangunan serta keluarga kecil yang berkualitas merupakan masalah kependudukan yang ada di Indonesia (Purnama *et al.*, 2023). Oleh karena itu, pemerintah harus membuat rencana atau strategi yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara efektif dan tepat waktu.

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan membentuk BKKBN untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk (Purnama *et al.*, 2023). Menurut Peraturan Presiden nomor 62 Tahun 2010, BKKBN diberi wewenang untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Pemerintah membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mewujudkan program KB. Dalam rangka mewujudkan program KB sebagai upaya pengendalian pertumbuhan penduduk, BKKBN bertugas untuk memberikan

arahan kepada semua pihak untuk dapat bekerja sama dalam menjalankan program KB.

Keluarga Berencana merupakan usaha untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan cara memakai kontrasepsi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat melalui usaha perencanaan dan pengendalian penduduk (Purwati, 2025). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang berupaya untuk menekan pertumbuhan penduduk dan angka kematian ibu (Janani *et al.*, 2024). Tujuan Program KB adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia, terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga (Yanti *et al.*, 2023).

Kegiatan program KB yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya dengan pembinaan peserta KB aktif untuk terus menggunakan kontrasepsi agar tidak terjadi *drop out*. Peserta KB aktif adalah individu yang sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi secara konsisten tanpa terjadinya kehamilan (Matahari *et al.*, 2018). Salah satu indikator keberhasilan program KB diukur dengan cakupan KB aktif.

Berdasarkan data BPS tahun 2024, persentase pengguna KB di Indonesia sebesar 56,26%. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024, persentase WUS (15-49 tahun) yang berstatus menikah dan menggunakan KB di Provinsi Sumatera Barat sebesar 46,19%, sedangkan WUS yang belum atau tidak menggunakan alat KB adalah sebesar 53,91% (BPS, 2024). Persentase WUS yang

menggunakan KB lebih rendah daripada persentase WUS yang belum atau tidak menggunakan KB. Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun 2021 (PK-21), alasan utama pasangan usia subur atau wanita usia subur tidak ber-KB atau menggunakan alat kontrasepsi adalah : ingin hamil (punya anak lagi), terkait alasan kesehatan, cemas akan efek samping alat kontrasepsi, *infertilitas* atau *menopause*, pasangan atau keluarga ada yang menolak penggunaan alat kontrasepsi, pasangan tinggal berjauhan (LDR), dan tidak ada alat kontrasepsi yang cocok. Hasil *Long Form* Sensus Penduduk tahun 2024 mencatat jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 5.836,2 jiwa, menempati urutan ke-11 dari 34 provinsi di Indonesia. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mencapai 46,19%, kelompok usia muda (0-14 tahun) mencapai 24,95%, dan kelompok usia tua (65 tahun ke atas) mencapai 7,08%.

Alasan wanita usia subur (WUS) tidak menggunakan kontrasepsi sebagian besar adalah karena rasa cemas dengan cara penggunaan atau rasa nyeri pada saat pemasangan. Kecemasan yang dirasakan oleh akseptor KB juga merupakan faktor yang menyebabkan akseptor mengalami drop-out dari KB yang digunakan (Purwati, 2024). Rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan KB (salah satunya implan) karena ketakutan dan kecemasan pada saat pemasangan alat kontrasepsi tersebut (Widaryanti *et al.*, 2020).

Kecemasan merupakan salah satu gangguan psikologis yang kerap dijumpai pada individu yang menghadapi situasi atau keputusan penting dalam hidupnya, termasuk pada akseptor alat kontrasepsi. Kondisi kecemasan ini bisa berdampak serius pada kualitas hidup, keputusan kesehatan, hingga kepatuhan terhadap penggunaan kontrasepsi yang telah dipilih. Dalam konteks program Keluarga

Berencana (KB), kecemasan akseptor berpotensi memengaruhi keberhasilan program pemerintah dalam menekan angka kelahiran serta meningkatkan kesejahteraan keluarga (Priyatna, Mu, Naviati, & Sudarmiati, 2021).

Banyak akseptor kontrasepsi, terutama kontrasepsi hormonal yang merasa cemas mengenai efek samping yang mungkin terjadi, seperti peningkatan berat badan, gangguan haid, osteoporosis, dan lain-lain (Noviayanti, 2017). Kecemasan berhubungan dengan rendahnya pengguna alat kontrasepsi jangka panjang, sebagian besar tingkat kecemasan ibu disebabkan karena ketidaktahuan efek samping dari kontrasepsi sehingga mempengaruhi perilaku akseptor (Ratna *et al.*, 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kecemasan terhadap efek samping kontrasepsi dapat menyebabkan individu menghindari penggunaannya meskipun terdapat manfaat yang signifikan bagi kesehatan reproduksi (Rochmawati, 2024). Studi oleh Jahanfar *et al.*, (2024) menemukan bahwa perempuan yang memiliki kecemasan tinggi terhadap efek kontrasepsi lebih cenderung memilih metode yang dianggap lebih alami, meskipun efektivitasnya lebih rendah dibandingkan metode medis yang lebih teruji.

Menurut Patotisuro Lumban Gaol (2004), kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata dan sewaktu-waktu terjadi pada diri individu serta adanya penolakan dari masyarakat menyebabkan kecemasan berada di lingkungan yang baru dihadapi. Sedangkan, menurut Blacburn & Davidson (2020), menjelaskan faktor-faktor yang menimbulkan kecemasan, seperti pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai situasi yang sedang dirasakannya, apakah situasi tersebut mengancam atau tidak memberikan ancaman, serta adanya pengetahuan.

Tingkat kecemasan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terkait meliputi potensi stresor, maturasi (kematangan), status pendidikan dan status ekonomi, tingkat pengetahuan, keadaan fisik, tipe kepribadian, sosial budaya, lingkungan atau situasi, usia dan jenis kelamin (Stuart dan Sundeen, 2021).

Mindarsih (2025) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan pekerjaan terhadap kecemasan ibu akseptor KB IUD dan Implan. Pendidikan akan mempengaruhi sikap seseorang dalam pengambilan keputusan karena semakin tinggi tingkat pendidikan akan semakin rasional dalam pengambilan keputusan, hal ini juga akan berlaku dalam pengambilan keputusan untuk memilih metode kontrasepsi yang sesuai, tepat dan efektif (Natalia, 2018). Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerima ide baru, termasuk salah satunya penggunaan alat kontrasepsi. Seseorang yang memiliki tingkat Pendidikan tinggi akan lebih luas dan mudah dalam menerima ide, lebih mandiri dan rasional dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan (Dewi *et al.*, 2021). Tingkat Pendidikan juga mempunyai pengaruh dalam menentukan pilihan, karena seseorang yang memiliki pendidikan tinggi pada umumnya akan lebih luas pandangannya dan lebih mudah menerima ide maupun hal-hal inovatif. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terbuka terhadap inovasi dan perubahan sosial. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang lebih kompleks, yang sangat penting dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (Lukman, 2021).

Seseorang yang bekerja akan dapat memperluas pengetahuan serta informasi sehingga dapat memberikan pertimbangan yang matang dalam

mengambil keputusan untuk menentukan kontrasepsi yang efektif dan efisien, khususnya MKJP (Budiarti *et al.*, 2017). Seseorang yang bekerja memiliki kesempatan lebih besar untuk berinteraksi dengan berbagai sumber informasi, yaitu dengan seminar, pelatihan, atau bahkan pengalaman langsung, yang dapat memperluas pengetahuan mereka tentang opsi kontrasepsi (Budiarti *et al.*, 2017). Pekerjaan, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan, mempengaruhi waktu yang dimiliki seorang ibu untuk mengurus anak. Ibu yang bekerja cenderung membatasi jumlah anak dan memilih kontrasepsi yang lebih efektif (Pratami, 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa individu yang bekerja memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengakses informasi, yang pada manfaatnya dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang (Ningrum 2018; Maulinda, 2024).

Kemajuan program KB tidak terlepas dari adanya dukungan dari keluarga, karena keputusan ber-KB sering kali dipengaruhi oleh dinamika keluarga, terutama suami sebagai pengambil keputusan utama dalam rumah tangga (Sari, 2025). Dukungan keluarga dianggap sebagai bentuk kepedulian yang dapat memotivasi PUS untuk mengikuti program KB. Tanpa dukungan emosional, informatif, dan instrumental dari keluarga, keikutsertaan KB sering kali terhambat, bahkan ditolak (Rohaya, 2021). Dalam kehidupan sosial, seseorang cenderung membutuhkan legitimasi dari lingkungannya, khususnya keluarga. Jika perilaku tertentu seperti mengikuti program KB tidak memperoleh dukungan, individu dapat merasa tidak nyaman atau cemas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, semakin tinggi dukungan keluarga, maka kemungkinan pasangan usia subur untuk menjadi

akseptor KB aktif juga akan semakin besar, karena merasa diterima, didukung, dan dihargai dalam pengambilan keputusannya (Aditya & Milkhatun, 2020).

Wilayah kerja Puskesmas Sungai Tarab II di Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang cukup aktif dalam pelaksanaan program KB. Target untuk capaian program KB di Provinsi Sumatra Barat khususnya di Kabupaten Tanah Datar adalah 60%. Berdasarkan laporan tahunan UPT Puskesmas Sungai Tarab II tahun 2024, terdapat 2.311 pasangan usia subur (PUS), dengan 1.634 (70,7%) akseptor KB aktif dengan distribusi penggunaan alat kontrasepsi yang cukup beragam. Dari data puskesmas Sungai Tarab, capaian ini telah mencapai bahkan melebihi dari target capaian minimal program KB yang ditetapkan pemerintah. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap program KB, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait pengelolaan kecemasan pada akseptor yang beragam karakteristiknya (Liasari *et al.*, 2023).

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa alat kontrasepsi suntik merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh akseptor KB yaitu 1.338 akseptor, 154 akseptor menggunakan pil, 51 akseptor menggunakan kondom, 51 akseptor menggunakan AKDR, 26 akseptor menggunakan implan, 15 akseptor melakukan steril (MOW) namun ada beberapa akseptor merasakan ada keluhan setelah menggunakan kontrasepsi. Dari survey awal yang dilakukan pada 10 orang akseptor KB, terdapat 6 akseptor yang mengalami keluhan kecemasan (2 orang akseptor KB suntik 3 bulan mengeluhkan cemas karena haid kurang teratur, 1 orang akseptor KB pil cemas karena beberapa kali lupa mengkonsumsi pil, 1 orang akseptor IUD merasa cemas karena haid lebih banyak daripada biasanya dan 1 akseptor IUD merasa cemas bila ada gangguan pada saat bersenggama, selanjutnya 1 orang

akseptor KB implant merasa cemas karna tidak teratur menstruasi). Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan alat kontrasepsi baik yang hormonal dan non hormonal dapat mempengaruhi kondisi emosional akseptor dan memunculkan kecemasan. Namun hingga saat ini, belum terdapat data atau pencatatan khusus mengenai keluhan kecemasan yang dialami akseptor KB dan instrumen skrining KB yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kecemasan di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tarab II.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi, baik hormonal maupun non-hormonal, dapat berpengaruh terhadap kondisi emosional akseptor, khususnya dalam menimbulkan kecemasan. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah terdapat hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan dan pengetahuan (faktor internal) dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB?
- b. Apakah terdapat hubungan faktor dukungan keluarga, dukungan sosial (faktor eksternal) dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan Tingkat kecemasan pada akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisis karakteristik responden akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.
- b. Untuk menganalisis distribusi frekuensi tingkat pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga, dukungan sosial dan kecemasan akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025
- c. Untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan, status pekerjaan, pengetahuan, dukungan keluarga dan dukungan sosial dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025
- d. Untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan reproduksi dan

psikologi kesehatan, terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji isu-isu serupa, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara pendidikan, pengetahuan, status pekerjaan, dukungan keluarga, dukungan sosial dengan tingkat kecemasan pada akseptor KB.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi Puskesmas Sungai Tarab II serta tenaga kesehatan di lapangan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan konseling dan edukasi bagi akseptor KB, sehingga dapat menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kepuasan akseptor.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam merancang program intervensi psikososial dan edukasi yang lebih efektif dengan menggunakan instrumen *Hamilton Anxiety Rating Scale* (HARS) untuk menskrining akseptor KB yang mengalami keluhan kecemasan, dan mengedukasi peran serta keluarga dan lingkungan sosial dalam mendukung keberhasilan program KB di wilayah kerja Puskesmas Sungai Tarab II Kabupaten Tanah Datar.

1.5 Hipotesis Penelitian

- a. Terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kecemasan pada akseptor KB.
- b. Terdapat hubungan antara status pekerjaan dengan kecemasan pada akseptor KB.

- c. Terdapat hubungan antara pengetahuan dengan kecemasan pada akseptor KB.
- d. Terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan kecemasan pada akseptor KB.
- e. Terdapat hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan pada akseptor KB.

